

Tugas dan wewenang komisi kejaksanaan sebagai lembaga pengawas eksternal kejaksanaan dalam pembaharuan sistem pengawasan di kejaksanaan

Mohamad Nurhedi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323526&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu masalah penegakan hukum yang mendapat sorotan begitu tajam dari masyarakat adalah masalah buruknya kinerja, kualitas, dan integritas aparat penegak hukum. Fungsi pengawasan sebagai faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kinerja penegak hukum dianggap lemah dan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lembaga kejaksanaan sebagai salah satu pilar penegak hukum pun tidak luput dari permasalahan ini. Pada dasarnya, pengawasan terhadap jaksa dan kejaksanaan sudah dilaksanakan baik secara internal maupun secara eksternal. Namun, masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan selama ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pengawasan secara internal yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan menghadapi berbagai permasalahan yang rumit dan kompleks. Pengawasan secara eksternal pun tidak dapat berpengaruh banyak. Perubahan sistem yang menyeluruh serta perubahan sikap budaya kerja Kejaksanaan menjadi suatu keharusan. Pembaharuan pengawasan harus bertujuan agar pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksanaan berjalan efektif, efisien sehingga mampu meningkatkan citra kejaksanaan di mata publik. Dengan berdasar pada Pasal 38 Undang-Undang tentang Kejaksanaan Republik Indonesia, Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksanaan. Tugas dan wewenang Komisi Kejaksanaan tidak saja melakukan pengawasan terhadap jaksa dan pegawai kejaksanaan, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap organisasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia kejaksanaan. Begitu besar dan beratnya tugas dan wewenang Komisi Kejaksanaan harus diimbangi dengan kualitas dan integritas anggotanya serta adanya kejelasan dalam tata cara mekanisme pengawasan. Sebagai lembaga baru, Komisi Kejaksanaan memberikan harapan adanya perbaikan dan perubahan pada kejaksanaan. Oleh karenanya, Komisi Kejaksanaan harus segera melakukan langkah nyata dalam melakukan pembaharuan pengawasan terhadap kejaksanaan serta kehadirannya dapat meningkatkan optimisme publik terhadap pembaharuan Kejaksanaan secara keseluruhan.